



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KELOMPOK SUBSTANSI MASYARAKAT DAN KERJA SAMA

NOMOR SOP	PPE.207.OT.02.02 Tahun 2022
TANGGAL PEMBUATAN	
TANGGAL REVISI	12 Desember 2022
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Dr. Dhafiana Putra, Bc.IP,S.H.,M.Si. NIP.19690909 199303 1 001
NAMA SOP :	PPID PERUNDANG-UNDANGAN
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan7 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik8 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan13 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia14 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia15 Pedoman Standar Layanan Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-07.HH.05.06 Tahun 2022	<ol style="list-style-type: none">1 Memahami alur Permohonan Informasi Publik2 Mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pelayanan informasi publik3 Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik dan pelayanan informasi publik4 Mempunyai kemampuan menggunakan email5 Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer6 Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien7 Mempunyai wawasan luas8 Mempunyai kemampuan public speaking9 Mempunyai kemampuan menulis
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none">1 Media Informasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none">1 Peraturan Perundang-undangan2 Komputer, Scanner, Printer3 Jaringan Internet.4 Alat Tulis Kantor5 Lemari rak dokumen/buku/hardware
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat sistem kerja di lingkungan Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama.	Di simpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

